

Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, Nursantri Yanti, Khalish Khairina, Wahyu Syarvina, M. Fauzan, Asmawati, Asiah Wati, Fauzul Hanif Noor Athief, Ichsan, Rahmawati, M. Iqbal, Anton Priyo Nugroho, Iskandar Chang, Malahayatie, Arna Asna Annisa, Asra, Heny Rofizar, Isra Maulina, Lesi Hertati, Reni Ria Armayani Hasibuan

Buku Chapter

MASA DEPAN
**EKONOMI
SYARIAH**
INDONESIA

Editor :

**Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.
Taufiq, SH.I., MA.**

Pengantar :

Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution

(Guru Besar Emiritus UIN Sumatera Utara Medan,
Ketua DPS Bank Sumut Syariah)

Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.

(Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya,
Sekjen Kemenag Periode 2014-2018)

Dr. H. Danial, S.Ag., M.Ag.

(Rektor IAIN Lhokseumawe)

Assoc. Prof. Dr. Sutan Emir Hidayat

(Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS RI)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN LHOEKSEUMAWE**

BUKU CHAPTER
MASA DEPAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

BUKU CHAPTER
MASA DEPAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA

Penulis:

*Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, Nursantri Yanti, Khalish Khairina, Wahyu Syarvina,
M. Fauzan, Asmawati, Asiah Wati, Fauzul Hanif Noor Athief, Ichsan, Rahmawati, M. Iqbal,
Anton Priyo Nugroho, Iskandar Chang, Malahayatie, Arna Asna Annisa, Asra,
Heny Rofizar, Isra Maulina, Lesi Hertati, Reni Ria Armayani Hasibuan*

Editor:

*Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.
Taufiq, SH.I., MA.*



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Lhokseumawe**

BUKU CHAPTER
MASA DEPAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA

Penulis:

Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, Nursantri Yanti, Khalish Khairina,
Wahyu Syarvina, M. Fauzan, Asmawati, Asiah Wati, Fauzul Hanif Noor Athief,
Ichsan, Rahmawati, M. Iqbal, Anton Priyo Nugroho, Iskandar Chang, Malahayatie,
Arna Asna Annisa, Asra, Heny Rofizar, Isra Maulina, Lesi Hertati,
Reni Ria Armayani Hasibuan

ISBN:

978-623-96647-3-2

Editor:

Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.
Taufiq, SH.I., MA.

Desain Cover:

Ade Risma

Cetakan Pertama:

Januari 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM - IAIN LHOKSEUMAWE
Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275, No. 1, Bukit Rata, Alue Awe - Lhokseumawe
Aceh, Indonesia

Kata Pengantar

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Buku Chapter Masa Depan Ekonomi Syariah Indonesia ini merupakan sebuah karya anak-anak negeri ini yang memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan ekonomi syariah khususnya di Tanah Air. Buku ini adalah kolaborasi bersama berupa hasil riset, pemikiran maupun kajian strategis yang dihasilkan oleh 20 orang penulis yang terdiri dari para akademisi, praktisi maupun cendekiawan yang berasal dari 10 Perguruan Tinggi di Indonesia. Berbagai aspek penting yang mencakup masa depan ekonomi syariah di Indonesia sangat detail dibahas dalam buku ini, sehingga buku ini layak dijadikan sebuah rujukan bacaan maupun menjadi bahan pertimbangan berbagai *stakeholder* guna pengembangan ekonomi syariah ke depannya. UPT. Jurnal FEBI - IAIN Lhokseumawe terus berusaha mempublikasikan hasil pemikiran-pemikiran terbaik anak bangsa ini tidak hanya melalui publikasi jurnal ilmiah yang terbit secara berkala, tetapi juga mencoba menyatukan hasil pemikiran tsb melalui buku.

Tahniah! Kepada para penulis yang telah memberikan kontribusi keilmuannya kepada khalayak ramai. UPT. Jurnal FEBI - IAIN Lhokseumawe mengucapkan terima kasih kepada pihak Dekanat FEBI - IAIN Lhokseumawe yang terus memberikan dukungan guna pengembangan keilmuan, teristimewa kepada Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution (Guru Besar Emiritus UIN Sumatera Utara/Ketua DPS Bank Sumut Syariah), Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si. (Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya/Sekjen Kemenag Periode 2014-2018), Dr. H. Danial, M.Ag. (Rektor IAIN Lhokseumawe), dan Assoc. Prof. Dr. Sutan Emir Hidayat (Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS RI) yang antusias memberikan pengantar maupun sambutan dalam buku ini. Terima kasih juga disampaikan kepada tim editor Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag. (Guru Besar UIN Sumatera Utara) dan bapak Taufiq, SH.I., MA. (Wakil Dekan III FEBI - IAIN Lhokseumawe), yang sudi meluangkan waktu untuk melakukan *editing* atas buku ini.

Semoga buku ini dapat bermanfaat kepada khalayak ramai, mampu meningkatkan literasi ekonomi syariah di Indonesia dan menjadi bagian dari perjuangan membesarkan ekonomi syariah di negeri dengan mayoritas Muslim ini.

Lhokseumawe, 6 Januari 2022 M
2 Jumadil Akhir 1443 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Kepala UPT. Jurnal FEBI – IAIN Lhokseumawe

KOLABORASI AKADEMISI UNTUK PENGEMBANGAN
EKONOMI SYARIAH:

Serangkai Kata Pengantar Editor

Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.

Taufiq, SH.I., MA.

Yang diharapkan dari sistem ekonomi syariah adalah perubahan dari *homo economicus* ke *homo ethicus*. Artinya bahwa sistem ekonomi syariah ini akan menjadi ajang kehidupan ekonomi yang tidak semata-mata mencari keuntungan pribadi tetapi juga untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah implementasi konsep masalah dalam konsumsi dan produksi. Melalui konsep masalah, maka diharapkan tidak terjadi akumulasi modal pada individu-individu tertentu, sehingga akan terjadi kesejahteraan bersama sesuai dengan proporsi ekonomi yang didapatkan atau diperoleh.

Sistem ekonomi Islam tidak memperbolehkan terjadinya *maytsir* di dalam transaksi, larangan *gharar* atau *uncertainty* dalam transaksi, kemudian juga larangan untuk jual beli *mulasamah* dan *munabadzah*, larangan riba/bunga dalam transaksi dan lainnya yang tidak menguntungkan untuk kesejahteraan bersama. *Maytsir* adalah sistem ekonomi yang berbasis *gambling* atau judi. *Gharar* terjadi di dalam akad, yaitu akad yang di dalamnya terdapat sesuatu yang membahayakan, misalnya dengan melakukan spekulasi, mengandung resiko, bahaya dan ketidakpastian. Selain itu juga harus menghindari sistem *mulasamah* atau membeli sesuatu tanpa melihat secara nyata apa yang dibelinya, *munabadzah* juga sistem jual beli yang juga tidak jelas apa yang dibelinya tersebut. Keduanya mengacu pada sistem jual beli yang tidak diketahui secara jelas, sehingga berpeluang terjadinya penyesalan dan merasa tertipu. Termasuk di sini adalah menjual barang yang belum dimilikinya.

Pandangan fiqih muamalah tentang ekonomi tentu sangat jelas, sebab dapat dibedakan mana yang diperbolehkan atau dianjurkan dan mana yang dilarang atau agar tidak dilakukan. Sebagaimana kajian di dalam fiqih muamalah, maka berbagai transaksi di dalam kegiatan ekonomi yang mengandung aspek *gharar*, riba, *maytsir*, secara tegas dilarang di dalam Islam. Hal ini memberikan gambaran tentang bagaimana pengelolaan atau penyelenggaraan kegiatan ekonomi harus mengandung transparansi, kejujuran, keadilan dan kesejahteraan bersama secara proporsional. Islam sebagai agama terakhir

dalam jajaran agama *Samawi* memberikan patokan dasar dalam usaha-usaha ekonomi bagi masyarakat.

Dewasa ini perkembangan ekonomi syariah menuai masa yang membanggakan, yaitu melalui dukungan pemerintah yang sangat jelas, misalnya keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), MUI, organisasi percepatan perekonomian syariah dan perbankan syariah, seperti Komite Nasional Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah (KNEKS), yang dipimpin langsung oleh Presiden dengan ketua hariannya adalah Wakil Presiden, KH. Ma'ruf Amin.

Yang turut serta membanggakan adalah kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan gabungan dari Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), Bank Mandiri Syariah (BSM) dan Bank Nasional Indonesia Syariah (BNI Syariah). Penggabungan tiga bank syariah yang sangat sehat ini tentu akan dapat menjadi momentum baru bangkitnya perekonomian syariah sebagaimana yang dicitakan oleh masyarakat Indonesia. BSI diharapkan akan dapat menjadi raksasa ekonomi syariah baru di era sekarang dan yang akan datang.

Tidak hanya perbankan syariah yang berkembang tetapi usaha-usaha syariah juga berkembang. Usaha-usaha Syariah (UUS) seperti produk halal, wisata halal, kuliner halal, asuransi syariah, akuntansi syariah, dan sebagainya juga berkembang pesat. Hal ini menandai bahwa telah terjadi proses untuk bergerak lebih cepat dalam kerangka percepatan perkembangan ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dapat dilihat dari data yang dieluarkan oleh berbagai lembaga ekonomi syariah global, yaitu: berdasarkan *Global Economic Finance*, Indonesia berada di posisi nomor 1 pada tahun 2021, dimana tahun sebelumnya berada di urutan ke-2. Berdasarkan *Global Islamic Economy Report*, Indonesia berada di urutan ke-4 tahun 2021, dan sebelumnya berada di urutan ke-5. Sedangkan berdasarkan *Islamic Finance Development Report*, Indonesia berada di urutan ke-2 dari sebelumnya berada di urutan pertama.

Berdasarkan atas penilaian dari Ekonomi Islam Global ini, maka memberikan indikasi bahwa ekonomi syariah di Indonesia mengalami kenaikan. Artinya bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui penguatan infrastruktur organisasi dan keuangan syariah tentu berdampak positif terhadap pengembangan ekonomi syariah. Dewasa ini juga bergerak dengan cepat tentang perwakafan, zakat, sedekah dan infaq. Melalui keterlibatan masyarakat lewat Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) oleh

pemerintah, maka perkembangan zakat juga akan bisa lebih cepat. Munculnya konsep wakaf uang tentu juga merupakan terobosan dalam rangka memberikan peluang lebih besar pada masyarakat untuk terlibat dalam gerakan filantropi melalui wakaf.

Yang juga terlibat di dalam gerakan ekonomi syariah juga Perguruan Tinggi (PT). Baik PTKI maupun PTU. Perkembangan ekonomi syariah tampak misalnya dengan semakin banyaknya program studi ekonomi syariah, baik di PTKI maupun PTU. Di UIN, IAIN bahkan PTKIS juga banyak berkembang prodi ekonomi syariah. Semuanya memberikan gambaran bahwa era sekarang adalah era ekonomi syariah. Semakin banyaknya PTKI maupun PTU yang memiliki prodi ekonomi syariah tentu berkah sekaligus tantangan, terutama pada alumninya untuk masa depan. Oleh karena itu, selain harus meningkatkan kualitas lulusannya juga relevansinya dengan perkembangan peluang bekerja pada lembaga keuangan syariah yang jumlahnya juga semakin meningkat.

Salah satu diantara upaya untuk terlibat di dalam pengembangan ekonomi syariah adalah yang dilakukan oleh para dosen, yang selama ini terlibat di dalam transfer ilmu pengetahuan tentang ekonomi syariah. Buku yang hadir di hadapan para pembaca adalah usaha yang dilakukan oleh dosen-dosen perguruan tinggi di Indonesia. Ada sebanyak 20 dosen yang juga merupakan praktisi dan peneliti dari 10 perguruan tinggi yang berkolaborasi untuk menulis buku ini. Dari tulisan-tulisan ini, maka bisa diklasifikasi dalam beberapa segmen, yaitu: produk halal, misalnya tentang komoditas makanan dan minuman, kosmetika, *tourisme* halal, dan *fesyen* Muslim. Kemudian tentang keuangan syariah, misalnya akuntansi syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan syariah dan lembaga non keuangan syariah, sukuk, *fintech* dan pasar modal syariah. Berikutnya adalah pengembangan SDM ekonomi syariah, misalnya: optimalisasi SDM ekonomi syariah, auditor syariah, dan profesi akuntansi syariah. Tema yang lain adalah: peluang ekonomi syariah, literasi keuangan syariah, perkembangan ekonomi syariah serta regulasi dan dukungan politik untuk pengembangan ekonomi Syariah.

Tulisan yang bervariasi dari para dosen PT ini memberikan gambaran bahwa para dosen memiliki varian di dalam fokusnya dalam mengkaji ekonomi syariah. Namun jika diperhatikan bahwa semuanya merupakan tulisan-tulisan terpilih dengan tema pengembangan ekonomi syariah. Buku ini menyajikan tentang bagaimana ekonomi syariah harus dikembangkan oleh berbagai perspektif, yaitu ada dari pemerintah melalui kebijakan politik yang memihak kepada ekonomi syariah, dan dari akademisi dalam konteks penguatan

pendidikan ekonomi syariah, dari para profesional ekonomi syariah dalam corak penguatan SDM ekonomi syariah.

Buku ini juga dapat dijadikan referensi dan inspirasi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ekonomi Syariah. Di tengah Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), maka buku sebagai bahan ajar tentu dapat dijadikan sebagai inspirasi penelitian dan kemudian didarmabaktikan untuk pengabdian masyarakat. Pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat adalah tridharma perguruan tinggi yang perlu disinergikan dan dijadikan satu kesatuan untuk kepentingan pendidikan di satu sisi, dan kepentingan masyarakat di sisi lainnya. Selamat membaca....

Medan, 23 Desember 2021

Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.
Taufiq, SH.I,MA.

Kata Pengantar

Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution
(Guru Besar Emiritus UIN Sumatera Utara Medan/
Ketua DPS Bank Sumut Syariah)

Bagi Saya, ekonomi syariah memiliki kesan yang mendalam dan menjadi bagian dari sejarah perjalanan hidup. Bagaimana bermula sikap apatis Saya terhadap ekonomi Islam hingga berlanjut pada ajakan alm. Tengku H. Rizal Nurdin (Mantan Gubernur Sumatera Utara) untuk mengikuti seminar dan *workshop* ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh *International Islamic University Malaysia (IIUM)* di Malaysia pada tahun 1991. Kegiatan tersebut seolah menyadarkan, membuka mata Saya dan memberikan segenap semangat untuk mengembangkan ekonomi syariah bersama para *stakeholder* khususnya di Provinsi Sumatera Utara pada saat itu.

Saat ini kita ketahui ekonomi syariah tengah *booming* dan bagian *trend* yang telah menjadi *life style* tidak hanya bagi kaum Muslimin tetapi juga bagi segenap penduduk di tanah air. Pesatnya perkembangan ekonomi syariah bagi masyarakat Indonesia telah menunjukkan bahwa bermuamalah sesuai dengan syariat Islam merupakan ajaran yang *universal* dan bahagian dari Islam yang *Rahmatan lil'alam*. Ekonomi syariah saat ini tidak lagi pada masa perkembangan di awal yang kita kenal hanya pada sektor keuangan dan perbankan, namun telah berkembang pada seluruh aspek bermuamalah sesuai syariat di dalam kehidupan, mulai dari *halal food*, destinasi pariwisata halal, *halal cosmetics*, maupun aspek-aspek lainnya yang berkaitan erat dengan aktifitas kehidupan masyarakat.

Berbicara masa depan merupakan sesuatu hal yang kompleksitas. Masa depan merupakan gambaran yang terbentuk dari sekumpulan upaya dan asumsi dari pengalaman masa lalu, yang berinteraksi dengan informasi dari lingkungan untuk membentuk harapan mengenai masa depan, membentuk tujuan, dan aspirasi serta memberikan makna pada kejadian di masa depan. Untuk itu tentunya kita semua tentu berharap masa depan ekonomi syariah di Indonesia semakin cerah dan mampu menjadi sebuah solusi atas permasalahan ekonomi yang selama ini terjadi, sehingga *falah* yang selama ini menjadi tujuan dari ekonomi syariah dapat tercapai.

Buku *chapter* Masa Depan Ekonomi Syariah Indonesia ini merupakan cerminan bagaimana kondisi ekonomi syariah saat ini di Indonesia, serta upaya yang dibangun oleh para penulis dalam menggali dan menguraikan melalui hasil pemikiran maupun riset tentang kondisi ekonomi syariah yang ada pada saat ini dan tentunya masa depan ekonomi syariah di Indonesia. Apresiasi saya kepada seluruh penulis yang turut serta dalam perjuangan membesarkan ekonomi syariah di Indonesia melalui tulisan ini, dan tentunya kepada pihak UPT. Jurnal IAIN Lhokseumawe yang mampu menginisiasi terbitnya buku ini. Tentunya hal ini akan menjadi amal kebaikan dan bagian dari upaya para akademisi, praktisi dan cendekiawan berjuang melalui “kekuatan” yang dimiliki.

Medan, 6 Januari 2022

Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution

Guru Besar Emiritus UIN Sumatera Utara Medan

Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Sumut Syariah

**DUKUNGAN PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN INSTITUSI
PENDIDIKAN TINGGI UNTUK EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA:**

Sebuah Kata Pengantar

Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.

*Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya/
Sekjen Kemenag RI Periode 2014-2018*

Pendahuluan

Sebagai akademisi yang selama ini berkecimpung di dalam program pembelajaran, terutama Metode Studi Islam, termasuk Studi Ekonomi Syariah, pada Program Doktor di UIN Sunan Ampel dan di UIN Mataram dan UIN Malang, maka saya tentu menyambut dengan riang gembira ketika diminta untuk memberikan “Kata Pengantar” dalam buku yang disusun oleh 20 dosen dari berbagai Universitas di Indonesia dengan tema “Masa Depan Ekonomi Syariah Indonesia”. Buku ini diedit oleh Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag. (Dosen Ilmu Fiqh pada UIN Sumatera Utara) dan Sdr. Taufiq, SH.I., MA. (Wakil Dekan III FEBI - IAIN Lhokseumawe). Sebuah buku yang bisa menjadi referensi bagi para peneliti, akademisi dan peminat studi ekonomi Syariah di berbagai universitas di Indonesia.

Ekonomi Syariah di Indonesia, sesungguhnya telah memasuki era baru melalui dukungan penuh dari pemerintah. Jika dilacak secara historis, maka bisa diketahui di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), maka pengembangan ekonomi Syariah telah dilakukan, misalnya dengan Gerakan Ekonomi Syariah (GRES), yang diresmikan oleh Presiden SBY untuk memberikan dukungan khususnya bagi pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia. Di era ini juga dukungan dari para akademisi dan praktisi ekonomi Syariah juga sangat kuat, misalnya keterlibatan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang secara meyakinkan telah memberikan sejumlah solusi tentang bagaimana seharusnya mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka keterlibatan pemerintah juga semakin kuat, misalnya lahirnya organisasi semi pemerintah, yaitu Komite Nasional Ekonomi Syariah, yang melibatkan para Menteri dan tokoh-tokoh perbankan dan akademisi untuk terlibat di dalam program percepatan pengembangan ekonomi Syariah. Di dalam perkembangannya, KNKS kemudian menjelma menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang langsung dipimpin oleh presiden, dengan ketua hariannya adalah Wakil Presiden dan beberapa Menteri yang terkait.

Perkembangan dukungan pemerintah yang luar biasa tentu menjadi cambuk bagi dunia perbankan Syariah dan keuangan Syariah.

Berdasarkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, maka terdapat klaster yang penting untuk diperhatikan, yaitu: **pertama**, Penguatan Rantai Nilai Halal: Klaster Makanan dan Minuman halal, klaster pariwisata halal, klaster fesyen Muslim, klaster Media dan Rekreasi Halal, Klaster Farmasi dan kosmetik Halal, Klaster energi terbarukan. **Kedua**, Penguatan Keuangan Syariah: klaster perbankan Syariah, Klaster Pasar Modal Syariah, klaster jaminan sosial, zakat dan wakaf. Selain ini juga terdapat penguatan usaha kecil, mikro dan menengah dan penguatan ekonomi digital. Di dalam kata pengantar ini tidak semua klaster dibahas, akan tetapi hanya klaster jaminan produk halal, zakat, wakaf dan kerja sama kelembagaan untuk pengembangan ekonomi Syariah.

Potensi Produk Halal di Indonesia

Potensi produk halal Indonesia sangat besar, misalnya produk makanan dan minuman, perdagangan, parfum dan komestik, obat-obatan, wisata atau *tourism*, dan barang gunaan.

Indonesia memiliki sejumlah ikon wisata yang sangat masyhur, baik wisata religious maupun non-religious. Yang religious, seperti makam para wali, situs-situs keagamaan, dan nonwisata religious seperti pantai, hutan, gunung, teluk, danau, bawah laut dan air terjun.

Indonesia juga memiliki sejumlah produk kerajinan, rumah batik, rumah adat, desa adat, desa wisata, dan lainnya. Indonesia memiliki potensi kesenian dan budaya yang bisa menjadi momentum wisata local maupun internasional. Indonesia memiliki pusat-pusat perdagangan yang bertaraf internasional, baik di Jakarta, Surabaya, Jogjakarta, Surakarta, Semarang. Misalnya konsep Joglo Semar, dan sebagainya.

Di dalam *Global Islamic Economy (GIE)* dijelaskan bahwa negara-negara non-Muslim justru menjadi pengeksportir besar pada produk-produk halal, misalnya Australia menjadi pengeksportir daging halal ke seluruh dunia, bahkan Vietnam dan Thailand menjadi pemain besar dalam perdagangan syariah dan kemudian Jepang melalui *halal food*.

Indonesia belum dapat menguasai pasar syariah, tetapi negara-negara non-Muslim lainnya sudah mampu. Indonesia belum bisa menjadi pemain karena variabel harga yang masih tinggi, kemasan yang kurang baik dan kapasitas

produk yang belum optimal. Indonesia sudah masuk 10 besar negara yang memproduksi produk halal, dalam bidang *Halal Food, Islamic Finance, Mode Fashion, Halal Pharmaceutical and Cosmetics*.

Indonesia dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, ternyata justru hanya menjadi pasar produk halal dan belum bisa menjadi produsen produk halal. Bandingkan dengan Brazil yang jumlah umat Islamnya sangat sedikit, hanya 0,0002 persen dari populasinya ternyata justru menjadi pemain kuat di dalam produk halal. Brazil sekarang ini sudah menjadi pemain besar dalam makanan halal.

Berdasarkan tulisan Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, bahwa pada tahun 2018, Indonesia membelanjakan 173 Milyar dollar AS untuk makanan dan minuman halal atau sebesar 12,6 persen dari pangsa produk makanan halal dunia. Indonesia memang bisa menjadi pasar bagi produk halal, sebab mayoritas penduduknya beragama Islam dengan komitmen yang tinggi untuk menggunakan produk halal. Usaha-usaha yang optimal telah dilakukan oleh pemerintah. Misalnya dengan diterbitkannya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), yang dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden, dan Menteri-menteri terkait, lalu mergernya bank-bank syariah (BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah) menjadi Bank Syariah Indonesia, yang berdasarkan potensi dan peluang akan bisa bersaing di dunia perbankan syariah dunia. Pada tahun 2018 pasar halal dunia mencapai 2,2 trilyun dollar AS, dan tahun 2024 mencapai sebesar 3,2 trilyun dollar AS. (Kompas, 17/02/2021).

Dukungan pemerintah Indonesia yang sedemikian kuat belum disambut dengan gegap gempita oleh para pengusaha khususnya pengusaha menengah atas. Yang bisa dilihat barulah pada usaha-usaha syariah dalam skala menengah, dan kecil. Sebenarnya, potensi makanan Indonesia sangat luar biasa. Jenis dan macam makanan yang terdapat di Indonesia sebenarnya sangat potensial untuk dijadikan komoditas di dunia internasional. Hanya saja kebanyakan masih merupakan usaha-usaha yang berskala mikro dan belum bisa memasuki pangsa pasar yang lebih luas.

Oleh karena itu, diperlukan beberapa strategi: **pertama**, memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, khususnya dalam menyongsong era produk halal yang terus berkembang. Tuntutan dan gaya hidup masyarakat Muslim yang semakin religius, semestinya menjadi tantangan bagi dunia usaha untuk menangkapnya. Dewasa ini *life style* masyarakat Muslim semakin mengarah kepada religiusitas dengan *performance* yang ingin ditampakkannya.

Wisata halal, perbankan syariah, makanan dan minuman halal, penggunaan produk keuangan Syariah, kegiatan filantropi, dan fashion syariah telah menjadi gaya kehidupan masyarakat Muslim khususnya kelas menengah. Dengan demikian, usaha pemerintah untuk menaikkan keuangan syariah, perbankan syariah dan produk syariah semestinya ditangkap sebagai peluang yang besar.

Kedua, makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer. Makanya, kebutuhan akan makanan dan minuman tidak akan pernah berhenti kapan dan dimanapun. Di tengah gelegak kehidupan masyarakat yang semakin religius, maka mau tidak mau harus tersedia pemenuhan kebutuhan primer berlabel halal. Dalam lima tahun ke depan, seiring dengan literasi produk halal, maka masyarakat akan melakukan pilihan dalam menentukan keputusan membeli atau tidak membeli makanan dan minuman. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali para pengusaha menengah dan besar untuk bermain di sektor makanan dan minuman halal. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja dengan jumlah umat Islam 87 persen, tentu membutuhkan produk halal yang cukup banyak. Di sisi lain, juga kebutuhan pasar internasional yang juga akan semakin besar. Seharusnya mulai dipikirkan bagaimana para pengusaha menengah dan besar untuk bisa menguasai pasar Timur Tengah yang tingkat literasi produk halalnya sudah sangat baik.

Ketiga, jika pengusaha menengah dan mikro bisa bermain dalam kawasan regional dan nasional, maka para pengusaha menengah dan besar harus bermain di sektor internasional. Yang dilakukan oleh Brazil dengan BRF yang membuka ekspansinya melalui peresmian pabrik makanan halal terbesar di Uni Emirat Arab adalah contoh bagaimana Brazil menangkap peluang usaha. Strategi Brazil ini tentu disebabkan oleh diplomasi pemerintah yang kuat dan juga dukungan pengusaha besar di Brazil. Seandainya ada ekspansi perusahaan besar dari Indonesia, tentu negara Timur Tengah akan memilih bekerja sama dengan perusahaan Indonesia. Namun demikian, kiranya politik perdagangan harus dimainkan agar peluang usaha tersebut akan bisa menjadi realitas.

Potensi Filantropi di Indonesia

Zakat, wakaf, sedekah dan infaq merupakan *public fund* yang keberadaannya dijamin oleh agama. Artinya, bahwa agama memiliki sejumlah konsep yang terkait dengan ajaran ini. Ajaran philantropi merupakan prinsip mendasar di dalam agama Islam, selain syahadat atau persaksian tentang keberadaan Allah

dan utusannya, lalu shalat yang merupakan ritual sebagai tiang agama, dan puasa untuk menahan makan, minum dan relasi seksual di siang hari, serta haji ke Ka'batullah. Zakat menjadi rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Dengan demikian ajaran mengeluarkan sebagian harta untuk zakat merupakan perintah agama yang mendasar.

Zakat dikenal memiliki beberapa dimensi, yaitu zakat harta, zakat fitrah, zakat profesi, zakat pertanian dan peternakan. Semua zakat ini memiliki takaran sesuai dengan aturan di dalam agama atau hukum fiqih. Misalnya zakat fitrah dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5 kg beras atau setara itu, lalu zakat profesi sebesar 2,5 persen dari gaji, dan zakat harta, peternakan dan pertanian tentu sesuai dengan kaidah yang sudah termaktub di dalam ilmu fiqih.

Selain dana zakat yang harus dikeluarkans sesuai dengan nisabnya, maka juga terdapat dana wakaf, infaq dan sedekah. Masing-masing memiliki karakteristiknya, dan cakupannya sesuai dengan prinsip di dalam ajaran Islam. Wakaf merupakan pengeluaran oleh individual atau sekelompok individu dan lembaga yang memberikan barang atau uang kepada pengelola wakaf untuk kepentingan membangun umat Islam di manapun. Sedangkan infaq dan sedekah diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh individu yang berinfaq dan bersedekah. Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang yang dikeluarkan oleh individu, kelompok atau institusi yang diserahkan pengelolaannya kepada nazir wakaf untuk tujuan kemaslahatan umat.

Indonesia memiliki peluang yang besar dalam *public fund* yang berupa wakaf. Hal ini tentu dikaitkan dengan jumlah penduduk Muslim yang mencapai 87 persen populasi di Indonesia dengan kemampuan finansial dan aset yang relatif memadai. Melalui prediksi yang dilakukan oleh Baznas (2020), maka potensi zakat di Indonesia mencapai angka Rp178,65 trilyun sampai Rp180 trilyun.

Kelas menengah, termasuk ASN, berkecenderungan untuk mengeluarkan anggaran belanja untuk philantropi yang semakin menguat. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Alvara Research Center, bahwa belanja amal sebanyak 5 persen dari porsi belanja rumah tangga atau total pengeluaran. Belanja tersebut meliputi tabungan 12,6 persen, investasi 3,1 persen, asuransi 7,3 persen, cicilan hutang 9,8 persen, kebutuhan keluarga 43,7 persen, zakat/amal 5 persen, telepon 5,4 persen dan hiburan/*entertainment* sebesar 7,5 persen (Baznas, 2021). Melalui angka-angka ini tentu bisa diprediksi besaran potensi wakaf uang yang bisa dikeluarkan oleh ASN di Indonesia.

Berdasarkan atas porsi belanja amal sebesar 5 persen dari total pengeluaran, maka diperkirakan bahwa akan terdapat sebanyak 29 juta KK x Rp7,5 juta (expenses perbulan) x 5 persen maka akan terdapat angka Rp10,875 trilyun, sehingga dalam satu tahun akan didapatkan angka sebesar Rp130 trilyun. (Baznas, 2021). Melalui angka-angka prediktif ini, maka kiranya dapat dikalkulasi bahwa potensi wakaf uang di kalangan ASN dengan menggunakan perhitungan jumlah ASN Muslim sebesar 3.654.000 orang, maka akan ketemu angka sebesar Rp. 4,1 trilyun per tahun.

Mendorong Program Sertifikasi Halal

Jumlah pengusaha kecil yang memang wajib sertifikat sesuai regulasi yang berlaku tentu sangat banyak. Usaha dalam sektor makanan dan minuman, serta usaha-usaha barang gunaan tentu juga sangat banyak jumlahnya. Usaha ini kebanyakan dimiliki dan dikembangkan oleh pengusaha kecil dan mikro yang memiliki sasaran kelas menengah ke bawah dan dengan harga terjangkau. Mereka merupakan usaha-usaha rumahan yang dikelola dengan manajemen tradisional dan dipasarkan secara terbatas.

Industri makanan dan minuman sampai saat ini masih menjadi andalan bagi perekonomian Indonesia. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah, maka pertumbuhan industri makanan dan minuman masih cukup menjanjikan. Untuk tahun 2021, Kemenperin masih memprediksi bahwa pertumbuhan industri makanan masih berkisar pada angka 4,49 persen, sedangkan industri minuman sebesar 4,39 persen. Namun peluang realisasinya untuk makanan dan minuman sebesar 4,44 persen pada tahun 2021. Namun demikian, para pengusaha memprediksi di atas angka tersebut (Tempo.co diunduh 24/02/2021). Pertumbuhan sebesar ini bisa diharapkan dengan catatan bahwa penanganan Covid-19 *on the track* dan angka penyebarannya menjadi lebih kecil atau mengecil.

Sesuai dengan regulasi bahwa mulai 17 Oktober 2019 dan seterusnya dinyatakan bahwa semua produk, baik makanan atau minuman, kosmetik dan obat-obatan serta barang gunaan harus terjamin kehalalannya atau bersertifikat halal. UU No 33 tahun 2014 menyatakan bahwa semua produk harus bersertifikat pada lima tahun setelah UU ini diundangkan, artinya semua produk di Indonesia harus bersertifikat halal. Problemnnya adalah pada aspek industri kecil dan mikro yang kebanyakan merupakan industri rumahan dan dikelola secara tradisional. Jumlahnya mencapai jutaan, sehingga akan sangat sulit untuk melakukan sertifikasinya.

Pemerintah berupaya *shortcut* dengan cara *self declare*. Pengusaha harus menyatakan bahwa produknya halal, karena sumber dan teknik yang digunakan sesuai dengan standat halal. Misalnya produk makanan dipastikan bahwa sumber atau bahannya halal dan proses atau tekniknya juga halal. Inilah yang kemudian bisa memastikan bahwa produk tersebut bisa dinyatakan sebagai produk halal. Termasuk juga produk minuman, misalnya minuman dalam kemasan botol seperti minuman beras kencur, jahe merah, jeruk nipis, kopi sachet, asem dan susu sapi perahan, dan sebagainya harus halal dengan cara *self declare* dimaksud. Demikian pula produk makanan kaki lima, seperti nasi goreng, nasi udak, nasi tumpeng, nasi kebuli, tahu goreng, pisang goreng dan sebagainya juga harus jelas halal dengan cara *self declare*.

Namun demikian, *self declare* harus sesuai dengan regulasi dan etika yang berlaku. Makanya ada beberapa catatan yang penting di dalam upaya *self declare*, yaitu: **Pertama**, *self declare* merupakan upaya pemerintah untuk memberi peluang usaha secara lebih berkembang dengan mengedepankan pada transparansi dan kejelasan produk tersebut sehingga dapat menjadi jaminan ketidakraguan konsumen yang memanfaatkan. Di sini maka para pengusaha diminta untuk mengembangkan budaya kejujuran dan keterbukaan. Jangan melakukan kebohongan publik tentang produk yang dipasarkannya.

Kedua, diharuskan ada pendampingan di dalam pengembangan usaha berbasis *self declare*, misalnya Perguruan Tinggi, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan juga masyarakat lainnya. Perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau organisasi sosial keagamaan untuk melakukan pendampingan atas *self declare* para pengusaha makanan dan minuman. Institusi ini memiliki dan menjadi penjamin kehalalan produk yang dihasilkan oleh pengusaha UMKM. Dengan demikian secara regulatif dan etik, maka terdapat lembaga yang bertanggungjawab atas kehalalan produk.

Ketiga, sebagai pendamping dan penjamin kehalalan produk, maka tentu diharuskan untuk melakukan *testing* atau pemeriksaan atas kehalalan produk. Secara periodik dapat dilakukan uji kehalalan dan hasilnya bisa di-*share* melalui media massa atau media sosial terhadap kehalalan produk. Budaya tanggungjawab dan etika berusaha ini harus ditanamkan dengan cara melakukan inspeksi mendadak dan pengambilan sampel tentang produk makanan dan minuman untuk diuji kehalalannya.

Keempat, melalui proses yang “berbelit” untuk memperoleh sertifikasi, maka menjadi mustahil jika pada tahun 2019 dan seterusnya akan terjadi *booming*

sertifikasi produk halal khususnya pada industri makanan dan minuman. Tidak hanya prosedur administrasinya akan tetapi juga anggaran yang dibutuhkan. Sementara itu anggaran untuk sertifikasi produk makanan dan minuman untuk jutaan pengusaha tentu tidak mungkin dianggarkan. Anggaran pemerintah untuk program sertifikasi halal tidak akan mencukupi untuk menjangkau semua industri makanan dan minuman. Oleh karena itu, melalui *self declaration* diharapkan bahwa akan tumbuh industri makanan dan minuman halal yang berstandart regulasi dan etika.

Kelima, upaya *shortcut* yang dilakukan oleh pemerintah ini tentu akan memiliki dua matra sekaligus, yaitu memotong mata rantai jaminan produk halal yang rumit dan terbatas kapasitasnya, sehingga akan memudahkan bagi para pengusaha untuk masing-masing menjamin bahwa produknya halal sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh institusi terkait, lalu juga bisa menjadi penjamin bagi konsumen bahwa produk yang dikonsumsi halal. *Self declare* tidak dimaksudkan untuk melakukan “penipuan” kepada konsumen atas produk yang diperjualbelikan.

Dengan demikian, para pengusaha akan bergairah untuk berusaha dan konsumen juga akan yakin bahwa yang dikonsumsi juga halal. Sekarang masyarakat Indonesia sedang menuju menjadi masyarakat yang lebih *religious*, yang ditandai dengan yang serba syariah, misalnya: makanan dan minuman halal, wisata syariah, hotel syariah, pakaian halal, kosmetik halal, bahkan juga obat-obatan halal. Dengan upaya *shortcut* ini, maka ke depan akan dapat dipastikan bahwa gaya hidup halal akan menjadi trend dan para pengusaha dapat pula memenuhi kebutuhannya.

Membangun Kemitraan dengan Perguruan Tinggi

Ada beberapa alasan tentang pentingnya kerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi (PT) untuk pengembangan ekonomi syariah, yaitu; **Pertama**, Perguruan tinggi merupakan mitra strategis bagi perbankan syariah, sebab selain memiliki mahasiswa dan keluarga juga memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang tentu potensial dalam rangka terlibat di dalam pengembangan perbankan syariah. Tidak hanya akan bisa menjadi nasabah tetapi juga mitra strategis untuk memperkuat jaringan pengembangan keuangan syariah, baik keuangan inklusif maupun noninklusif. Selain itu PT juga memiliki sejumlah pakar dalam bidang ekonomi syariah, baik sebagai dosen maupun praktisi perbankan syariah. Melalui mereka maka akan bisa dikembangkan upaya-upaya inovatif untuk pengembangan usaha-usaha

syariah maupun perbankan syariah. Misalnya melalui disertas yang dihasilkan oleh PT, maka didesain untuk problem solving percepatan pengembangan keuangan syariah dan perbankan syariah.

Kedua, dewasa ini sedang digalakkan program wakaf uang. Potensi wakaf uang ini luar biasa. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh BWI, maka potensi wakaf uang Indonesia mencapai angka Rp. 180 trilyun. Sedangkan potensi wakaf uang ASN se-Indonesia sebesar Rp. 3 trilyun per tahun (data BWI) atau 4,1 trilyun per tahun (Nursyamcentre dan dipublis oleh Kemenag). Artinya, bahwa wakaf uang bisa menjadi dana publik atau *public fund* yang bisa didayagunakan untuk pengembangan Pendidikan.

Ketiga, pemerintah sedang menggalakkan produk halal. Indonesia setiap tahun membelanjakan impor produk halal sebanyak 173 Milyar dollar US atau sebesar 12,5 dari produk halal dunia. Artinya pengeluaran anggaran untuk pemenuhan kebutuhan produk halal di Indonesia cukup besar. Dilakukan impor sebab produk halal Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan pasar. Pemerintah sesungguhnya sudah membuat *short cut* untuk memberikan “kemudahan” bagi para pengusaha UMKM, yaitu melalui skema *self declair*. Melalui skema seperti ini, maka sudah dilakukan pemangkasan pembiayaan, rentang waktu dan proses yang relative berbelit di dalam UU No. 33 tentang Jaminan Produk Halal. Melalui UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka pemerintah telah berupaya untuk menolong para pengusaha yang berkeinginan untuk program sertifikasi halal. Tentu jangan dianggap dengan *self declair* segala sesuatunya menjadi mudah, sebab tetap harus ada proses pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan tinggi atau organisasi sosial keagamaan atau Lembaga professional lainnya. UIN yang sudah memiliki laboratorium uji halal tentu bisa melakukan pendampingan ini secara terstruktur dan sistematis. UIN yang akan mendekclair terhadap kehalalan produknya. Di sini tentu ada label, institusi pendamping dan pemberitaan di media sosial.

Keempat, kemitraan strategis dengan Perbankan Syariah adalah tentang mendesain program, melaksanakan program dan evaluasi program. Desain program terkait dengan bagaimana merancang program pendampingan terhadap sejumlah UMKM (misalnya UMKM di bidang makanan dan minuman). Lalu bagaimana program ini diselenggarakan, misalnya dengan melakukan pemetaan UMKM di wilayah Jawa Timur dan berapa yang bisa dibantu untuk *self declair*. Penting juga dilakukan evaluasi dan monitoring untuk tetap memberikan jaminan bahwa produk dimaksud tetap menjaga

kehalalannya. Melalui program evaluasi dan monitoring, maka akan didapati compliance para pengusaha terhadap label halal melalui *self declair*.

Kelima, Perguruan Tinggi harus segera merumuskan kerja strategis terkait dengan wakaf uang dan jaminan produk halal. Ke depan dua area ini akan menjadi andalan. Dunia jaminan produk halal membutuhkan Lembaga yang memiliki kapasitas untuk menjadi Lembaga pemeriksa Halal (LPH) dan juga pendamping UKM/UMKM untuk *self declair* yang juga membutuhkan penyelia halal baik bagi pengusaha (UMKM) atau LPH dan Pendamping JPH. Tentu lalu juga dibutuhkan program studi Audit Halal, yang memiliki tiga fokus yaitu auditor keuangan syariah, auditor perbankan syariah dan zakat dan wakaf (zawa). Sudah saatnya kemitraan strategis ini bekerja untuk memenuhi pangsa pasar ke depan yang variatif dan potensial, sehingga peran PTKIN dan perbankan Syariah untuk mendongkar keuangan Syariah akan semakin nyata.

Penutup

Indonesia merupakan negeri dengan jumlah umat Islam terbesar, sehingga potensi untuk mengembangkan ekonomi syariah tentu sangat besar. Namun demikian masih diperlukan keterlibatan banyak pihak untuk bisa merealisasikannya. Indonesia diharapkan bisa menjadi lokomotif pengembangan ekonomi syariah, karena dukungan pemerintah terhadap perkembangan ekonomi syariah juga sangat kuat. Untuk mengembangkan ekonomi syariah, maka diperlukan kerja sama atau sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak, misalnya pemerintah, dunia perbankan Syariah, dunia nonperbankan, lembaga ekonomi syariah atau usaha-usaha syariah, lembaga sosial keagamaan, lembaga sosial ekonomi dan juga perguruan tinggi.

Ada banyak jenis dan cakupan ekonomi syariah, namun demikian yang diperlukan penguatan adalah mengenai jaminan produk halal, zakat, wakaf dan sedekah. Selain juga asuransi syariah, akuntansi syariah, perbankan syariah dan usaha-usaha syariah. Semua ini dilakukan dalam tujuan untuk meningkatkan peran perekonomian syariah dalam keterlibatannya untuk membangun kesejahteraan umat.

Wallahu a'lam bi al shawab.

Surabaya, Desember 2021

Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.

Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya/Sekjen Kemenag RI Periode 2014-2018

Kata Pengantar

Dr. H. Danial, M.Ag.
(Rektor IAIN Lhokseumawe)

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat intelektualitas dan spiritualitas, sehingga *book chapter* dengan judul “Masa Depan Ekonomi Syariah Indonesia” telah terbit. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. sumber aspirasi dan inspirasi serta keteladanan di berbagai aspek kehidupan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Sdr. Angga Syahputra dan tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Lhokseumawe atas “jihad dan ijtihad” intelektual dalam merealisasikan *book chapter* ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami alirkan kepada para penulis yang telah mengerahkan segenap energi intelektual/keilmuan untuk menyumbangkan tulisan mereka, sehingga lahirnya *book chapter* ini.

Semua lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan Islam mengemban amanah untuk melaksanakan caturdarma ilmu, yaitu; (1) mentransformasikan ilmu melalui pendidikan-pengajaran; (2) mengembangkan ilmu melalui penelitian; (3) mengaplikasikan ilmu melalui pengabdian; dan (4) melestarikan serta menyebarkan ilmu melalui tulisan dan penerbitan. *Book chapter* ini merupakan wujud pelaksanaan darma keilmuan yang ke-4, yaitu melestarikan dan menyebarkan ilmu melalui tulisan dan penerbitan. Semua upaya untuk mewujudkan terlaksananya caturdarma ilmu di atas khususnya dalam bentuk penerbitan (*book chapter*) sangat patut mendapat dukungan dan apresiasi, apalagi tema yang diusung adalah masa depan ekonomi syariah di Indonesia.

Book Chapter yang berada di tangan pembaca ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, ditulis oleh mereka yang memiliki latar keilmuan yang sesuai dengan tema yang diusung dan berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kedua, pembahasannya disusun secara sistematis, argumentatif, lugas, dan kaya nuansa. Ketiga, temanya sangat aktual di tengah bangkitnya spirit dan kesadaran keuangan Islam di tengah gempuran persaingan keuangan global.

Kami juga ingin menekankan pentingnya usaha berkelanjutan untuk mengembangkan ekonomi syariah ke tahapan berikutnya dan memperkuat ketahanan pasar untuk kemajuan industri. Dengan upaya dan inisiatif bersama, Kami sangat percaya ekspansi keuangan syariah secara global dan kontribusinya pada sistem keuangan yang adil akan terwujud.

Akhirnya kami ucapkan selamat membaca, semoga *book chapter* ini bermanfaat bagi kita semua.

Lhokseumawe, Januari 2022
Rektor IAIN Lhokseumawe,

Dr. H. Danial, S.Ag., M.Ag.

Apresiasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Kata Sambutan

Assoc. Prof. Dr. Sutan Emir Hidayat

Saat ini posisi Indonesia pada tingkat ekonomi dan keuangan syariah global berada dalam posisi yang membanggakan. Hal ini terlihat dalam *Global Islamic Economy Indicator 2020/2021*, Indonesia berada di peringkat ke-4, dimana sebelumnya Indonesia menduduki peringkat ke-5 dunia. Di sisi lain, perkembangan keuangan syariah Indonesia juga kembali mencatatkan prestasi. Pada *Islamic Finance Country Index (IFCI) 2021*, dan *Islamic Finance Development Indicator (IFDI) 2021*, Indonesia juga menempati peringkat ke dua pada masing-masing index. Hal ini tentunya merupakan kabar gembira bagi Indonesia atas usaha yang terus dilakukan berbagai pihak dan dukungan pemerintah dalam memperluas perkembangan ekonomi syariah guna memperkuat ketahanan perekonomian nasional.

Buku *chapter* yang diinisiasi oleh UPT. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Lhokseumawe ini merupakan langkah baik yang terus kami dukung dalam rangka memberikan informasi kepada pembaca tentang Masa Depan Ekonomi Syariah Indonesia melalui hasil kajian riset yang dilakukan oleh akademisi, peneliti dan cendekiawan dari berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia yang *concern* terhadap ekonomi syariah. Selain memberikan informasi, buku ini tentunya dapat menjadi rujukan dan bahan pertimbangan bagi berbagai *stakeholder* dan yang tidak kalah penting menjadi upaya meningkatkan literasi keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia.

KNEKS memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para penulis atas dedikasinya memberikan sumbangsih bagi percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Berbagai pihak perlu terus bersinergi, bahu-membahu, berjabat-tangan dalam berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengakselerasikan perkembangan ekonomi syariah di negeri tercinta ini. Semoga upaya-upaya yang dilakukan para penulis menjadi amal kebajikan yang tercatat dalam sejarah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Jakarta, 22 Desember 2021

Assoc. Prof. Dr. Sutan Emir Hidayat

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR	vii
KATA PENGANTAR PROF. DR. H. M. YASIR NASUTION	xi
<i>(Guru Besar Emiritus UIN Sumatera Utara Medan, Ketua DPS Bank Sumut Syariah)</i>	
KATA PENGANTAR PROF. DR. H. NUR SYAM, M.Si.	xiii
<i>(Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Sekjen Kemenag Periode 2014-2018)</i>	
KATA SAMBUTAN DR. H. DANIAL, M.Ag.	xxiii
<i>(Rektor IAIN Lhokseumawe)</i>	
KATA SAMBUTAN ASSOC. PROF. DR. SUTAN EMIR HIDAYAT	xxv
<i>(Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS RI)</i>	
DAFTAR ISI	xxvi
KONDISI TERKINI EKONOMI SYARIAH	1
<i>Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan., S.E.I., M.E.I. (FEB – Universitas Malikussaleh)</i>	
BONUS DEMOGRAFI BAGI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH	12
<i>Nursantri Yanti, M.E.I. (FEBI – UIN Sumatera Utara Medan)</i>	
EKONOMI SYARIAH DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA	23
<i>Khalish Khairina, M.Si. (FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	
LITERASI EKONOMI SYARIAH	34
<i>Wahyu Syarvina, MA. (FEBI – UIN Sumatera Utara Medan)</i>	
RASIO INDEX SAHAM SYARIAH DAN KONVENSIONAL SELAMA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA	46
<i>M. Fauzan, M.E.I. (FEBI – IAIN Padangsidimpuan)</i>	
OPTIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH	57
<i>Dr. Hj. Asmawati, S.E., MM. (FEM Universitas Indo Global Mandiri)</i>	
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK	66
<i>Asiah Wati, S.E.Sy., M.E. (Fakultas Syariah – UIN Raden Mas Said Surakarta)</i>	

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON-BANK	77
<i>Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc. (FAI – Universitas Muhammadiyah Surakarta)</i>	
POTENSI FINANCIAL TECHNOLOGY	87
<i>Ichsan, Lc., M.E.I. (FEB – Universitas Malikussaleh)</i>	
GREEN SUKUK DAN PENYELAMATAN LINGKUNGAN	95
<i>Rahmawati, MA. (FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	
ASURANSI SYARIAH	103
<i>M. Iqbal, S.H., M.E. (FEBI – UIN Raden Fatah Palembang)</i>	
WISATA HALAL	115
<i>Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM. (Magister Ilmu Agama Islam, FIAI UII Yogyakarta)</i>	
POTENSI HALAL FOOD & BEVERAGES	125
<i>Iskandar Chang, M.Si. (FEBI – IAIN Salatiga)</i>	
POTENSI BISNIS HALAL COSMETICS DAN HALAL FASHION DI INDONESIA	134
<i>Dr. Hj. Malahayatie, MA. (FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	
DAMPAK KAWASAN INDUSTRI HALAL BAGI PEREKONOMIAN	144
<i>Arna Asna Annisa, MSI. (FEBI – IAIN Salatiga)</i>	
ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH DAN WAKAF	154
<i>Asra, S.Sy., M.Ag. (FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	
PERAN AUDITOR SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ..	163
<i>Heny Rofizar, S.E., M.Si., Ak., CA (FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	
PERAN AKUNTAN SYARIAH	172
<i>Isra Maulina, SE., M.Si. (FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	
PENTINGNYA AKUNTANSI SYARIAH DALAM PERWAKAFAN INDONESIA	181
<i>Dr. Lesi Hertati, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA., CAPF., CAPM. (Fakultas Ekonomi Akuntansi - Universitas Indo Global Mandiri)</i>	
TANTANGAN PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI PERDESAAN	195
<i>Reni Ria Armayani Hasibuan, M.E.I. (FEBI – UIN Sumatera Utara Medan)</i>	

POTENSI *FINANCIAL TECHNOLOGY*

Ichsan, Lc., M.E.I.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Malikussaleh

Email: ichsan84@unimal.ac.id

A. Pendahuluan

Sejarah peradaban manusia telah mencatat bahwa manusia dari awal penciptaan sampai zaman modern saat ini terus berevolusi dalam menghasilkan karya dan cipta, tujuan utama adalah untuk mempermudah keberlangsungan hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar. Kemampuan akal merupakan faktor utama dalam menemukan hal-hal baru tersebut, terkait akan bagaimana mempertahankan hidup dengan tepat guna dan tepat cara. Teknologi merupakan hasil cipta karya anak manusia dalam sejarah peradaban untuk mempertahankan eksistensi sebagai makhluk hidup di atas permukaan bumi, dari kehidupan yang sangat sederhana dalam memenuhi kebutuhan hidup sampai ditemukannya berbagai alat guna mempermudah pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga kita temukan berbagai alat-alat yang sangat kompleks dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup tersebut. Revolusi industri pertama di Eropa pada abad 18 merupakan sebuah perubahan besar dalam perkembangan peradaban manusia di berbagai bidang, seperti: transportasi, pertanian, pertambangan, manufaktur dan teknologi sehingga mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pola dan sistem sosial, ekonomi dan budaya secara *global*.

Perkembangan revolusi industri dari 1.0 sampai 4.0 merupakan proses pencapaian manusia dalam menemukan hal baru dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dari ditemukannya mesin uap dan beralih ke mesin bertenaga listrik yang lebih masif dalam hal produksi sampai ditemukannya mesin komputer guna mempermudah manajemen produksi hingga ditemukannya internet sebagai sebuah sistem yang mampu menjalankan komunikasi jarak jauh antara satu mesin ke mesin yang lain membuat dunia *global* yang sangat luas ibarat menjadi sebuah kota kecil yang mudah untuk berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain.

Seiring dengan perkembangan industri kegiatan ekonomi juga mengikuti arus cepatnya jalur perkembangan keuangan secara *global*, transaksi yang pada awalnya sangat sederhana juga berubah menjadi sebuah jaringan bisnis yang sangat kompleks. Tuntutan terhadap sistem keuangan yang serba *digital* di era modern merupakan jawaban dari berbagai

kompleksitas perkembangan industri, terutama teknologi yang semakin hari semakin berkembang.

Penggabungan antara teknologi dan finansial yang sering disingkat dengan TekFin atau dalam bahasa Inggris *Fintech* merupakan sebuah terobosan dalam dunia ekonomi dan khususnya sistem keuangan yang mengacu kepada digitalisasi sistem keuangan. Saat ini, dunia industri keuangan atau perdagangan mempunyai karakteristik dengan cepatnya lajur pertukaran transaksi sehingga sistem digitalisasi menjadi sebuah kebutuhan dalam dunia industri keuangan guna mempermudah berjalannya sistem keuangan secara efektif dan efisien.

Fintech merupakan singkatan dari *financial technology* atau teknologi finansial dan dapat diartikan sebagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi. *Fintech* memberikan kemudahan bagi konsumen dalam menggunakan/memanfaatkan berbagai layanan jasa keuangan secara digital, seperti: pembayaran, pinjaman, investasi, dan asuransi. Dengan menggunakan *fintech*, konsumen dapat melakukan transaksi pembayaran tanpa harus bertatap muka, memperoleh pinjaman tanpa harus mengunjungi kantor cabang bank, memilih, dan mengetahui produk keuangan yang paling sesuai dengan kebutuhan kita, berinvestasi secara mudah serta memperoleh nasihat perencanaan keuangan. Di sisi lain, *fintech* juga berperan penting dalam membantu lembaga keuangan untuk melakukan penilaian/pemeringkatan kredit serta proses mengenal konsumen secara elektronik sehingga memungkinkan UMKM dalam memperoleh pinjaman atau layanan keuangan lainnya (Asosiasi *Fintech* Indonesia, 2021).

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan *fintech* sangat mempermudah laju transaksi terkait dengan kegiatan keuangan. Dari pihak konsumen, sebagai uang elektronik yang dapat menyimpan uang dalam sistem pemograman berbentuk aplikasi dalam *smartphone* dan bisa ditambah jumlah uang tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan dari masing-masing aplikasi tersebut dalam bentuk *e-wallet*, juga dapat melakukan pembayaran sebagai sistem gerbang satu pintu dalam melakukan pembayaran, khususnya di pasar-pasar *online* atau lebih dikenal dengan *e-commerce*. *Fintech* juga bergerak di bidang pembiayaan dalam skema *peer-to-peer lending* atau dikenal dengan istilah *online lending*, skema ini lebih mengajak para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk lebih aktif mencari pendanaan dari masyarakat/perusahaan *Fintech* dengan pengajuan secara online yang lebih mudah syarat dan ketentuannya dibandingkan dengan pembiayaan yang diterapkan oleh perusahaan perbankan. Adapun langkah berikutnya dalam inovasi *fintech* adalah

mengenal konsumen secara elektronik atau dikenal dengan *Electronic Know Your Customer (e-KYC)* merupakan terobosan teknologi dalam memverifikasi data calon pelanggan saat mengajukan pembiayaan atau keanggotaan dalam aplikasi *Fintech*, sehingga kegiatan identifikasi data yang panjang dengan birokrasi berbelit dapat dipangkas prosesnya di sini secara cepat dan sangat menghemat waktu, kemudian dalam proses identifikasi dan penilaian juga dilakukan perengkingan kredit atau dana yang akan disalurkan kepada pelanggan/anggota aplikasi *Fintech* tersebut, proses ini juga sangat berkaitan dengan *machine learning* atau kecerdasan buatan (*artificial intilligent*) dalam menggunakan layanan penilaian kredit dengan memanfaatkan data alternatif calon pelanggan/anggota aplikasi seperti data transaksi di *e-commerce*, *history cached* di browser dan pola konsumsi/produksi yang terekam di *smartphone*, sehingga perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di jasa layanan internet membuka pintu selebar-lebarnya dalam pelayanan server yang mengarah kepada *big data* dan sistem komputasi awan.

Perkembangan teknologi yang dengan sangat cepat berkembang, terutama di bidang *Fintech* perlu diakselerasi selaras dengan syariat Islam. Pertumbuhan umat Islam dunia juga semakin hari semakin tumbuh sebagai pengguna jasa layanan *Fintech* ini yang nantinya saat umat Islam mengaplikasikan *fintech* sarat dengan aturan-aturan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, maka perlu adanya penyesuaian sistem layanan *fintech* yang sejalan dengan syariat Islam.

Fintech syariah di Indonesia diatur dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Berdasarkan fatwa tersebut, yang dimaksud dengan layanan *fintech* berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. *Fintech* syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksinya. Sehingga, terdapat perbedaan dalam bunga atau riba, akad, mekanisme penagihan hingga penyelesaian sengketa, serta harus memberikan kebermanfaatn bagi pihak-pihak yang saling bertransaksi. Perkembangan *Fintech* Syariah di Indonesia di dukung oleh keberadaan Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) yang diketuai Ronald Wijaya (CEO *EthisCrowd*). AFSI didirikan sebagai wadah untuk memajukan ekonomi syariah melalui teknologi finansial. Saat ini AFSI telah membentuk lembaga

khusus yaitu *AFSI Institute* yang mempunyai beberapa program seperti *workshop* dan pelatihan fiqih muamalah, *AFSI Goes to Campus*, konsultasi bisnis syariah serta melakukan riset dan kajian-kajian mengenai ekonomi Islam, guna mendukung realisasi potensi *fintech* syariah di Indonesia. Saat ini anggota dari AFSI berasal dari berbagai vertikal *fintech* seperti *peer to peer lending*, *aggregator*, dan *equity crowdfunding*. Dalam perkembangannya, *fintech* syariah mengalami berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi di kalangan masyarakat terkait keberadaan layanan keuangan syariah berbasis teknologi. Guna menjawab tantangan ini dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk mendukung edukasi dan sosialisasi *fintech* syariah di Indonesia (Fintech Indonesia, 2020)

Dari beberapa pemaparan tersebut maka penulis mencoba untuk membuka paradigma baru dari sebuah potensi yang masih sangat sedikit dibahas terkait potensi *fintech* syariah yang seharusnya mempunyai peluang-peluang yang tidak dimiliki oleh *fintech* konvensional, walaupun data yang diangkat dalam tulisan ini hanya beberapa contoh dari kalangan *fintech* syariah yang ada di Indonesia sebagai sampel dan juga memperkecil ruang lingkup penelitian secara geografis guna mencapai pemahaman yang lebih komprehensif.

B. Revolusi Perusahaan *Fintech* Syariah

Seiring dengan perkembangan pesat jasa layanan *fintech* secara *global*, perusahaan *fintech* syariah juga ambil bagian dalam perkembangan tersebut. Ada beberapa inovasi yang diangkat pada bagian ini terkait dengan perkembangan *fintech* syariah dari beberapa perusahaan yang mulai dari kecil sampai menjadi perusahaan raksasa menuju kepada sifat *unicorn*.

Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa layanan pembiayaan atau yang dikenal dengan istilah *Peer-to-Peer Lending* merupakan jasa layanan yang paling banyak dipakai dalam perusahaan *fintech* syariah, bukan hanya dimanfaatkan oleh segmen UMKM, akan tetapi juga sebuah terobosan sistem yang sangat meminimalisir risiko terhadap kegiatan tersebut karena terikat dengan beberapa akad yang diatur salam syariah Islam.

Salah satu perusahaan *fintech* syariah yang menjalankan aplikasi P2P Lending adalah PT. Alami Fintek Sharia dengan Tingkat Keberhasilan Pengembalian (TKB) dana sebesar 100% dengan jumlah mencapai 1 Triliun di tahun 2021 merupakan keberhasilan yang patut diapresiasi. Keberhasilan tersebut merupakan kerja keras tim *fintech* syariah besutan Dima Djani dan kawan-kawan dalam membangun sistem atau skema pelayanan keuangan

yang mudah dipahami oleh masyarakat luas dan dengan jaminan atas landasan syariah, sehingga para pendana dan para pelaku usaha yang akan meminjamkan dana di *fintech* tersebut merasa aman dengan sistem yang mereka bangun. Dari pencapaian tersebut dikabarkan mereka sedang memproyeksi sebuah terobosan baru dalam dunia digitalisasi perbankan yang dikenal dengan istilah *Neo-Bank*, dengan nama Hijra Bank.

Neobank adalah sebuah inovasi dalam teknologi keuangan yang menawarkan layanan perbankan digital tanpa cabang. Bank ini tidak memiliki bentuk fisik sebagaimana layanan bank pada umumnya, tetapi ia hadir sepenuhnya secara *online*. Selain itu, bank ini pun menyasar kepada nasabah yang *tech-savvy* atau paham dan fasih dalam teknologi, yang tidak keberatan melakukan sebagian besar pengelolaan keuangan mereka melalui aplikasi seluler. Cara kerja bank ini menggunakan sebuah aplikasi yang bisa diunduh ke dalam *smartphone* para penggunanya. Untuk mereka yang terbiasa dengan teknologi, akun *neobank* sangat gampang untuk diatur dan memiliki akses yang cepat. Adapun semua layanan pada *neo banking* dapat digunakan tanpa mengharuskan pengguna untuk menandatangani dokumen fisik. Artinya, pengguna hanya cukup mendaftarkan dirinya layanan bank lewat aplikasi dan semuanya sudah dapat diperoleh (duniafintech.com, 2021).

Dengan adanya sistem *Neo-Bank* pada Hijra Bank yang merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan *fintech* syariah ALAMI maka jasa layanan keuangan secara digital dan syariah lebih luas lagi ekspansinya, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa resiko-resiko yang akan terjadi terkait dengan penerapan teknologi yang semakin hari terus berkembang merupakan tantangan besar dalam terobosan dalam sistem *Neo-Bank*. Di China sistem perbankan yang mengusung 100% *fully-internet* ini merupakan hasil perkembangan dari media sosial yang banyak digunakan di Negeri Tirai Bambu tersebut dengan nama *WeBank* dari sebuah aplikasi chat terkenal *WeChat*, begitu juga di Korea memperkenalkan *Kakao Bank* lahir dari aplikasi chat *KakaoTalk*.

Sedangkan perusahaan *fintech* syariah PT. Ammana Fintek Syariah memberikan terobosan layanan manajemen keuangan yang sangat menggiurkan dalam program Perencanaan Porsi Haji. Selama ini porsi haji hanya bisa didaftarkan ketika setoran awal BPIH sudah terlunasi sebesar 25 juta Rupiah yang ditransferkan ke rekening Kementerian Agama, melalui perusahaan perbankan yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Agama baik bank konvensional ataupun bank syariah. Proses birokrasi dan persyaratan tersebut bagi sebagian masyarakat yang mempunyai niat untuk

berangkat haji untuk menunaikan rukun Islam ke 5 sangat menjadi hambatan, ditambah lagi antrian untuk keberangkatan sampai menunggu 20 tahun untuk kasus di beberapa provinsi. *Fintech* syariah Ammana mengambil peluang tersebut dengan memberikan akses layanan perencanaan porsi haji melalui DP dan cicilan yang sangat terjangkau. Dengan melakukan pendaftaran pada perusahaan *fintech* syariah tersebut melalui aplikasi mobile Android/iOS maka porsi haji sudah di-*booking* dan terintegrasi dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) milik Kementerian Agama. Skema yang diterapkan merupakan Perencanaan Syariah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Hutang dan Pembiayaan yang merujuk kepada akad *al-Qardh* sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 19/2001.

Terobosan tersebut merupakan peluang bagi perusahaan *fintech* syariah dalam mengelola keuangan secara digital dan menjadi tantangan bagi perusahaan-perusahaan perbankan baik konvensional maupun syariah yang selama ini berada di zona nyaman dengan sistem tradisional, masyarakat mempunyai persepsi dan penilaian tersendiri terkait dengan layanan jasa keuangan mana yang paling memberikan kemudahan dan kepastian, ditambah lagi *trust* masyarakat terhadap pengelolaan dana talangan haji yang dikelola oleh pemerintah semakin hari semakin berkurang, dan sudah banyaknya masyarakat yang tersadar dengan sistem ribawi apabila mendaftarkan di beberapa perusahaan perbankan dengan sistem konvensional terkait dengan pendaftaran porsi haji, sehingga mengarah untuk mencari alternatif yang lebih selamat, aman dan terjamin tidak hanya dari satu pihak tapi dari kedua pihak yang sedang menjalankan akad tersebut.

Terakhir, ada perusahaan *fintech* syariah yang dikenal dengan PT. Ethis Fintek Indonesia yang dengan terobosan barunya dan mengklaim sebagai perusahaan *fintech* syariah dengan layanan *Peer-to-Peer* syariah terhadap pembiayaan properti dan *real estate* pertama di dunia. Perusahaan yang dibawah oleh seorang pengusaha muda Ronald Yusuf Wijaya ini juga melakukan ekspansi tidak hanya di sektor perumahan atau infrastruktur properti, tetapi juga bergerak dalam pengembangan infrastruktur dan keamanan jaringan IT.

Seperti dilaporkan dalam *Global Islamic Financial Report Cambridge 2021*, Di tengah pemikiran yang biasa-biasa saja dan keterbatasan ukuran dan lokasi, ada beberapa inisiatif *fintech* yang menjanjikan yang dapat merevolusi *fintech* Islami. Mengingat bahwa pasar *fintech* Islami belum keluar

dari masa pertumbuhan, sulit untuk menarik daftar otentik dari pemain terbaik di bidang ini. ETHIS mungkin adalah contoh terbaik dari inisiatif *fintech* Islami yang telah tumbuh secara organik sejak awal. Dengan 30.000+ anggota dari lebih dari 50 negara, ETHIS tidak hanya tumbuh perlahan tetapi juga memainkan peran advokasi yang efektif (Cambridge, 2021).

Dari beberapa contoh terobosan yang telah disebutkan bahwa perkembangan teknologi terkait dengan layanan keuangan semakin hari semakin berkembang menyesuaikan dengan permintaan pasar, sinergitas para stakeholder dalam mengembangkan suatu produk digital kedepan merupakan sebuah pertimbangan yang layak diterapkan dalam sebuah disrupsi perkembangan teknologi yang terus berkembang.

C. Potensi Akademisi dan Praktisi dalam Menggali Inovasi *Fintech* Syariah

Dunia pendidikan juga merupakan batu loncatan pertama bagi para generasi yang sedang dalam proses pembelajaran terkait dengan perkembangan teknologi, tuntutan untuk tidak hanya menguasai fokus bidang tertentu di era revolusi industri 4.0 merupakan sebuah keniscayaan yang harus dimiliki oleh para pelajar di zaman modern ini, terlebih lagi seorang pengajar baik guru/dosen yang terus mengembangkan *soft-skill* nya untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Para praktisi juga demikian, untuk dapat bersaing menguasai pasar yang serba digital di era modern ini mereka dituntut untuk terus melakukan inovasi-inovasi digital yang mampu menjawab permintaan pasar secara *global*.

Dalam dunia pembelajaran Ekonomi dengan sistem pembelajaran secara tradisional yang hanya terpaut pada satu fokus disiplin keilmuan tidak mampu menjawab kompleksitas permasalahan yang ada, para sarjana seyogyanya mampu menambah keahlian dari beberapa disiplin keilmuan lainnya. Strategi Pemerintah di era pandemi Covid-19 dikarenakan keterbatasan ruang gerak baru muncul ide-ide terkait pembelajaran yang bersifat *cross-multidicipline* dengan slogan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka. Para pelajar/mahasiswa diarahkan untuk diberikan hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi, dengan adanya fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah tersebut mampu membuka wawasan baru bagi para mahasiswa untuk mempelajari hal yang sangat diperlukan di luar dari fokus program studi yang sedang ditempuh.

Salah satu cara untuk mengatasi kebutuhan yang mendesak akan sumber daya manusia yang terampil dan berbakat, dapat dilakukan dengan meningkatkan produksi modal manusia yang terampil melalui pendidikan modal intelektual yang efektif di bidang akademis dan penelitian.

Kebutuhan untuk menjembatani kurikulum akademik dengan kebutuhan industri juga penting untuk membawa solusi yang sangat dibutuhkan untuk masalah nyata. Meskipun ada beberapa institusi yang sudah mulai menjalankan program studi sebagai bagian dari program gelar di *fintech* konvensional, dan belum ada di program keuangan syariah (Mohamed & Ali, 2019).

Terkait dengan dunia industri dan dunia usaha *fintech*, ada beberapa keahlian baik berupa *soft-skill* atau *hard-skill* yang harus dipertimbangkan oleh para akademisi ataupun praktisi guna mengikuti perkembangan teknologi seperti; kecakapan dalam dunia internet dengan berbagai keahlian IT, *data scientist* yang sangat mempengaruhi perkembangan *user experience* (UX) terkait dengan produk yang akan didigitalisasi dan keterkaitan *big data* yang terhimpun dalam bentuk *server*, pemahaman terkait *Machine Learning* dan *Artificial Intelligent* juga sangat membantu perkembangan dan pertumbuhan *fintech* di masa yang akan datang. Walaupun sampai saat ini di Indonesia masih sangat sedikit jurusan atau program studi yang membuka program terkait dengan *fintech*, dari sekian banyak universitas di Indonesia hanya Universitas Prasetiya Mulya yang berani membuka program studi strata 1 *Fintech* dalam ruang lingkup ekonomi konvensional. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan baru bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang memiliki program studi Ekonomi Islam/Syariah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di bawah Kementerian Agama.

D. Daftar Pustaka

- Asosiasi *Fintech* Indonesia. (2021). *Hand Book Fintech Untuk UMKM*. 1-65. Cambridge. (2021). *Cambridge GIR 2021*.
- Duniafintech.com. (2021). *Neobank dan Perbedaannya dengan Bank Digital*. <https://duniafintech.com/apa-itu-neobank/>
- Fintech* Indonesia. (2020). *Fintech Corner*.
- Mohamed, H., & Ali, H. (2019). *Hazik Mohamed and Hassnian Ali Blockchain, Fintech, and Islamic Finance*. Walter de Gruyter. www.degruyter.com



Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution

Guru Besar Emiritus UIN Sumatera Utara Medan
Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Sumut Syariah

Buku chapter Masa Depan Ekonomi Syariah Indonesia ini merupakan cerminan bagaimana kondisi ekonomi syariah saat ini di Indonesia, serta upaya yang dibangun oleh para penulis dalam menggali dan menguraikan melalui hasil pemikiran maupun riset tentang kondisi ekonomi syariah yang ada pada saat ini dan tentunya masa depan ekonomi syariah di Indonesia. Apresiasi saya kepada seluruh penulis yang turut serta dalam perjuangan membesarkan ekonomi syariah di Indonesia melalui tulisan ini, dan tentunya kepada pihak UPT. Jurnal IAIN Lhokseumawe yang mampu menginisiasi terbitnya buku ini. Tentunya hal ini akan menjadi amal kebaikan dan bagian dari upaya para akademisi, praktisi dan cendikiawan berjuang melalui “kekuatan” yang dimiliki.

Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.

Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya
Sekjen Kemenag RI Periode 2014-2018

Sebagai akademisi yang selama ini berkecimpung di dalam program pembelajaran, terutama Metode Studi Islam, termasuk Studi Ekonomi Syariah, pada Program Doktor di UIN Sunan Ampel dan di UIN Mataram dan UIN Malang, maka saya tentu menyambut dengan riang gembira ketika diminta untuk memberikan “Kata Pengantar” dalam buku yang disusun oleh 20 dosen dari berbagai Universitas di Indonesia dengan tema “Masa Depan Ekonomi Syariah Indonesia”. Buku ini diedit oleh Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag. (Dosen Ilmu Fiqh pada UIN Sumatera Utara) dan Sdr. Taufiq, SH.I., MA. (Wakil Dekan III FEBI – IAIN Lhokseumawe). Sebuah buku yang bisa menjadi referensi bagi para peneliti, akademisi dan peminat studi ekonomi Syariah di berbagai universitas di Indonesia.

Dr. H. Danial, S.Ag., M.Ag.

Rektor IAIN Lhokseumawe

Semua lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan Islam mengemban amanah untuk melaksanakan caturdarma ilmu, yaitu; (1) mentransformasikan ilmu melalui pendidikan-pengajaran; (2) mengembangkan ilmu melalui penelitian; (3) mengaplikasikan ilmu melalui pengabdian; dan (4) melestarikan serta menyebarkan ilmu melalui tulisan dan penerbitan. Book chapter ini merupakan wujud pelaksanaan darma keilmuan yang ke-4, yaitu melestarikan dan menyebarkan ilmu melalui tulisan dan penerbitan. Semua upaya untuk mewujudkan terlaksananya caturdarma ilmu di atas khususnya dalam bentuk penerbitan (book chapter) sangat patut mendapat dukungan dan apresiasi, apalagi tema yang diusung adalah masa depan ekonomi syariah di Indonesia.

Assoc. Prof. Dr. Sutan Emir Hidayat

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS

KNEKS memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para penulis atas dedikasinya memberikan sumbangsih bagi percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Berbagai pihak perlu terus bersinergi, bahu-membahu, berjabat-tangan dalam berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengakselerasikan perkembangan ekonomi syariah di negeri tercinta ini. Semoga upaya-upaya yang dilakukan para penulis menjadi amal kebajikan yang tercatat dalam sejarah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Lhokseumawe
Jln. Medan-Banda Aceh Km. 275 No. 1
Buket Rata, Alue Awe, Lhokseumawe

